

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Australia dijuluki sebagai *hegemonic power* di kawasan Pasifik (Berteau, Green, & Cooper, 2014). Berbagai pengaruh telah Australia berikan kepada Pasifik termasuk Papua Nugini. Jika ditinjau dari segi geografis, Australia berdekatan dengan Papua Nugini. Papua Nugini memiliki posisi yang strategis yang dapat menguntungkan Australia. Posisi tersebut baik dari segi laut dan udara dapat menghubungkan perdagangan vital dan mitra pertahanan yang ada di Amerika Utara dan Asia Timur Laut (Wallis, 2014, p. 161)

Dari segi pertahanan, Papua Nugini adalah sebuah wilayah yang penting bagi keamanan Australia. Wilayah terdekat dapat dijadikan sebagai pangkalan oleh penguasa asing untuk menyerang Australia sebagaimana pengalaman Australia pada Perang Dunia Kedua (Brown, 2012, p. 5)

Sehingga untuk mengoptimalkan kepentingan keamanan Australia, maka melalui Buku Putih Keamanan Australia yang dikeluarkan pada tahun 2016 menjelaskan tujuan Australia selain mempertahankan keamanan dalam negeri, Australia memiliki capaian yakni “kawasan terdekat yang aman meliputi Asia Tenggara dan Pasifik Selatan” (Australian Government: Defence White Paper, 2016, p. 17). Keunikan dalam capaian ini, Papua Nugini disebutkan secara eksplisit dimana Australia berupaya menjadikan Papua Nugini sebagai mitra utama dalam bidang keamanan di kawasan. Sebagaimana

penulis kutip dari Buku Putih Keamanan Australia tersebut bahwa (Australian Government: Defence White Paper, 2016, p. 17)

“...Australia will continue to seek to be the principal security partner for Papua New Guinea, Timor-Leste and Pacific Island Countries in the South Pacific”

Dari segi bantuan luar negeri dan investasi, Australia adalah pemberi bantuan luar negeri terbesar untuk Papua Nugini dalam skala kawasan Pasifik. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh *Lowy Institute* (2018), sejak tahun 2015 hingga 2016 total bantuan yang diberikan sebesar USD 821,99 juta (Lowy Institute, 2018) dan 2017-2018 sebesar \$ 471,8 juta (Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade, 2018)

Namun, kehadiran Tiongkok di Papua Nugini semakin lama semakin masif sehingga pengaruh Australia berkurang di Papua Nugini. Hal ini didukung oleh Teori Ancaman Tiongkok atau *China Threat Theory*. Teori Ancaman Tiongkok memiliki banyak definisi, berupa ancaman militer Tiongkok, ancaman ekonomi, ancaman ras, ancaman peradaban, ancaman makanan, ancaman lingkungan, ancaman populasi dan lain lain (Ai, 2016, p. 453). Lain halnya dengan Hill (2010) menjuluki Tiongkok sebagai *China Threat* dan *China Syndrome*. *China Threat* atau Ancaman Tiongkok bagi Australia adalah sebuah permainan *zero-sum*, diakumulasi dengan kebijakan pendekatan konflik dan negara-negara Pasifik dijadikan sebagai “papan catur” geopolitik antara Tiongkok dan Australia (Hill M. , 2010, pp. 41-42).

Ada tiga asumsi yang mendukung Australia memandang Tiongkok sebagai *China Syndrome*. Pertama adalah ketegangan antara kepentingan Tiongkok di Pasifik

dan usaha mempertahankan kepentingan Australia di Pasifik sebagai kekuatan *western-order* sehingga aktor-aktor tersebut terlibat dalam kondisi kompetisi untuk memiliki pengaruh di kawasan Pasifik.

Kedua, bantuan Tiongkok yang bersifat” *no string attached*” dianggap mengancam upaya negara pemain yang dominan di kawasan Pasifik yakni Selandia Baru dan Australia yang telah memperkuat pengaruh politik dan ekonominya di kawasan Pasifik. Ketiga, perbedaan skala kekuatan antara *external power* dan negara-negara Pasifik sehingga menyebabkan kawasan tersebut sebagai objek strategis bukan aktor yang memiliki suaranya sendiri (Hill M. , 2010, pp. 42-43).

Berdasarkan Teori Ancaman Tiongkok tersebutm Australia kini kehilangan pengaruhnya di Papua Nugini karena adanya ancaman dari Tiongkok. Tiongkok sebagai salah satu pemain di Papua Nugini yang mengekspresikan hubungan dengan Papua Nugini melalui rekan bantuan luar negeri, perdagangan, investor asing untuk infrastruktur dan sumber pinjaman untuk bisnis kecil dan menengah (Jones, 2017).

Dari segi bantuan luar negeri, total bantuan yang dihabiskan Tiongkok untuk Papua Nugini pada tahun 2015-2018 sebesar USD 139.30 juta (Lowy Institute, 2018). Papua Nugini juga adalah negara penerima donor terbanyak dari Tiongkok dibandingkan negara di kawasan Pasifik lainnya (Lowy Institute, 2018). Secara keseluruhan, bantuannya ada pada sektor agrikultur, pertanian dan kehutanan, komunikasi, pendidikan, pemerintah dan masyarakat sipil, kesehatan, bantuan kemanusiaan, industri, pertambangan dan konstruksi, infrastruktur dan pelayanan dan transportasi. Namun, Total Bantuan Luar Negeri Tiongkok berada pada sektor

transportasi 28%, pendidikan 18% dan industri, pertambangan dan konstruksi sebesar 16% (Brant, 2015).

Dari segi politik, Tiongkok mampu mengupayakan kepentingannya. Salah satu contoh adalah Tiongkok melakukan tekanan publik agar Pemerintah Papua Nugini dan pemerintah lain di kawasan Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa kunjungan PM Peter O'Neill di Tiongkok pada tanggal 5-10 Juli 2016. Diplomat Tiongkok melakukan tekanan kepada negara Pasifik untuk mendukung Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Jones, 2017). Sehingga berdasarkan hasil pertemuan bilateral antar kedua negara menghasilkan pers bersama bahwa Papua Nugini menghargai dan mendukung Tiongkok dalam isu Laut Tiongkok Selatan dengan cara mendukung Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai bersama para pihak langsung melalui konsultasi dan negosiasi sesuai dengan hukum internasional (Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016).

Atas dasar Tiongkok yang semakin berpengaruh di Papua Nugini, Australia perlu untuk menanggapi. Pernyataan dari sekretaris Parlemen Australia untuk Kepulauan Pasifik, Richard Marles menyatakan bahwa kehadiran Tiongkok disambut baik oleh Australia (Marles, 2014). Namun disatu sisi, Australia perlu untuk melakukan upaya perimbangan (*rebalance*) terhadap pengaruh Tiongkok di Kepulauan Pasifik (Hegarty, 2015, p. 3).

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Australia menanggapi Tiongkok di Kepulauan Pasifik khususnya Papua Nugini dengan menggunakan konsep *soft*

*balancing*. *Soft balancing* adalah upaya untuk mengimbangi negara musuh atau negara yang berpotensi musuh dengan menggunakan metode non koersif dan didorong oleh kombinasi kepentingan ekonomi, isu keamanan dan kepentingan domestik (Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 2006, p. 147).

Salah satu contoh *soft balancing* Australia dalam hal menanggapi Pengaruh Tiongkok adalah tergantung pada kondisi hubungan AS (AS) dan Tiongkok. Australia melakukan pertimbangan dengan tetap menekankan hubungan dengan AS dan mengembangkan hubungan dengan kekuatan regional lainnya, seperti Jepang, Indonesia dan India. Selain itu, Australia bergerak untuk mengimbangi Tiongkok dengan turut serta dalam bentuk kerjasama ekonomi regional baik itu *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) dan KTT Asia Timur (McDougall, 2011, p. 15).

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai empat hal. Pertama, mengidentifikasi kepentingan Australia di Papua Nugini. Kedua, mengidentifikasi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam kepentingan Australia. Ketiga, mengaplikasikan konsep *soft balancing* oleh Robert A Pape sebagai cara untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merumuskan satu rumusan masalah: Bagaimana Australia mengaplikasikan *soft balancing* Australia sebagai upaya mengimbangi Pengaruh Tiongkok Papua Nugini tahun 2015-2019?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- i. Untuk mengidentifikasi kepentingan Australia di Papua Nugini
- ii. Untuk mengidentifikasi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini yang mengancam kepentingan Australia
- iii. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Australia mengaplikasi *soft balancing* sebagai upaya untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.

### 1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena banyak pembahasan baik dari pihak pemerintah, media, akademisi dan lembaga *think thank* yang meneliti tentang dinamika kebijakan Australia dalam menanggapi Pengaruh Tiongkok di Kawasan Pasifik. Di pihak lain, Pengaruh Tiongkok masih dianggap bukan sebagai ancaman bagi Australia karena Tiongkok sampai saat ini belum menunjukkan ciri-ciri yang akan mengancam secara langsung kepada Australia. Bahkan eksistensi Tiongkok di Kawasan Pasifik turut membantu perkembangan Kawasan Pasifik itu sendiri. Berdasarkan rekomendasi dari *Australian Strategic Policy Institute* bahwa jangan terlibat untuk menyalahkan siapapun atas kehilangan Pasifik ke Tiongkok (Herr, 2019, p. 32). Hal ini disebabkan oleh beberapa argumen sentral menyatakan bahwa Australia juga tidak memberikan prioritasnya ke Pasifik sehingga Tiongkok memiliki kesempatan untuk menempati posisi di Pasifik (O'Dowd, 2018). Salah satunya dengan memberikan bantuan baik berupa pinjaman yang dikenal sebagai *no string attached* kepada mitra Pasifiknya

yakni Papua Nugini sehingga memberikan kelonggaran bagi penerima untuk menggunakan dana tersebut (Doherty, 2018).

Namun disisi lain, pengaruh Tiongkok memunculkan pengaruh yang mengancam pemain *hegemonic power* termasuk Australia di Kawasan Pasifik. Karena perkembangan dan pertumbuhan Tiongkok di Asia Pasifik yang begitu masif disertai dengan ketegasan Tiongkok dalam sengketa regional (Berteau, Green, & Cooper, 2014, p. 1), maka keberadaan Tiongkok perlu untuk diperhatikan lebih lanjut. Seperti pernyataan tertulis di Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indo-Pasifik meningkat karena globalisasi. Aktor aktor yang terlibat didalamnya kini berubah, mulai dari AS sebagai penguasa yang dominan, kini Tiongkok hadir menentang kekuasaan AS (Australian Government, 2017, p. 1).

Untuk meningkatkan pengaruh di Indo-Pasifik, Australia meningkatkan hubungan dengan AS sebagai aliansi utamanya. Cara meningkatkan pengaruhnya di Kawasan Indo-Pasifik adalah dengan mendukung upaya perimbangan (*balance*) di Kawasan Indo-Pasifik dengan mempromosikan kawasan yang terbuka, inklusif dan kawasan berlandaskan hukum (Australian Government, 2017, pp. 1-4). Kemudian pernyataan PM Malcolm Turnbull pada saat peluncuran Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 menyatakan bahwa” *this is the first time in our history that our dominant trading partner isn't also our dominant security partner. We must see this an opportunity not as a risk*” (Collinson, 2017, p. 1) yang artinya adalah fakta bahwa mitra dagang Australia kini bukan termasuk mitra keamanan Australia. Sebagaimana penulis tinjau adalah Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama bagi Australia dari

segi ekspor dan impor (Holmes, 2013) sehingga Tiongkok menjadi aktor potensial yang dimaksud oleh pernyataan Malcolm Turnbull tersebut.

Dari pihak akademisi, Tulisan dari Rory Medcalf (2018) yang berjudul *Australia's Foreign White Paper Navigating in the Indo-Pacific* dapat menjadikan bukti bahwa Australia tidak memiliki posisi yang baik akan Pengaruh Tiongkok. Memang didalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia 2017 tidak menyebutkan Tiongkok sebagai musuh, namun karena ketidakpastian AS dibawah kepresidenan Donald Trump dan Pengaruh Tiongkok membuat Australia perlu untuk memikirkan strategi lain untuk memperoleh keuntungan bekerjasama dengan Tiongkok dengan tantangan akan menimbulkan perbedaan nilai bahkan berpotensi melawan kepentingan Australia (Medcalf, 2018, p. 33).

Pada penelitian ini akan menjadi penelitian baru karena penelitian ini akan membahas bagaimanana Australia mengaplikasikan *soft balancing* sebagai upaya mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019. Tulisan ini bersifat baru karena beberapa penulis lain belum meneliti secara komprehensif sesuai dengan indikator *soft balancing* oleh Robert A Pape yakni *territorial denial* (penolakan teritorial), *economic strengthening* (penguatan ekonomi), *entangling diplomacy* (melibatkan diplomasi) dan *signals of resolve to balance* (tekad untuk mengimbangi) dalam rangka untuk mengimbangi Tiongkok di Papua Nugini. Kemudian penelitian ini menjadi pelengkap bagi penelitian sebelumnya. Sebagaimana yang telah dituliskan oleh (Hegarty, 2015) yang membahas hanya salah satu indikator *soft balancing* yakni *economic stengthening*. Dalam tulisan tersebut menjelaskan tentang Australia



mengimbangi Pengaruh Tiongkok dengan cara *economic stengthening* bersama negara-negara Pasifik melalui program *Seasonal Workers Program*. *Seasonal Workers Program* adalah program untuk menyuplai tenaga kerja negara-negara Pasifik ke Australia dibidang industri holikultural (Hegarty, 2015, p. 10).

### 1.5 Cakupan Penelitian

Lingkup tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara yaitu Australia. Pembahasan akan dibatasi dengan mengambil sisi Australia dalam upaya mengaplikasikan *soft balancing* untuk mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015 hingga 2019.

Lingkup waktu diambil pada penelitian ini berkisar pada tahun 2015 sampai pada tahun 2019. Lingkup waktu ini diambil karena untuk menyelaraskan penelitian sesuai dengan satu rezim pemerintahan yang dipegang oleh partai liberal yakni PM Malcolm Turnbull (15 September 2015- 23 Agustus 2018) dan PM Scott Morrison (24 Agustus 2018-2019).

### 1.6 Kajian Pustaka

Terdapat perkembangan definisi dari *soft balancing*. *Soft balancing* melingkupi sebuah aliansi tertutup dengan mengembangkan perjanjian atau pemahaman tentang keamanan untuk mengimbangi negara musuh atau negara yang berpotensi mengancam atau negara *rising power* (Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 2006, p. 147). *Soft balancing* juga didasarkan pada penumpukan senjata yang tertutup atau terbatas,

kerjasama pelatihan militer sementara dan kolaborasi regional atau internasional (Paul, Wirtz, & Fortman, 2004, p. 3).

Beberapa penulis menyatakan bahwa negara musuh atau negara yang mengancam adalah AS karena kekuasaannya yang besar terutama paska perang dunia kedua. Beberapa penulis tersebut berpendapat bahwa *soft balancing* adalah upaya yang disengaja untuk menantang, menahan atau menggagalkan kekuasaan negara kuat dalam hal ini AS (Lieber & Alexander, 2005, p. 109; Pape, 2005, p. 8; Corrales & Penfold, 2015, p. 100).

He & Feng (2008) menjelaskan perbedaan dari *hard balancing* dan *soft balancing*. *Hard balancing* adalah sikap untuk meningkatkan kapabilitas negara untuk melawan negara musuh dalam rangka mencapai keamanan. Hal ini juga serupa dengan pengertian strategi *balancing* bahwa mengarah pada sikap negara untuk memiliki kapabilitas yang lebih baik daripada negara lain atau melakukan koalisi dengan beberapa negara dalam rangka memperoleh aset kekuasaan yang lebih besar (Art, Brooks, Wohlfort, Lieber, & Alexander, 2006, pp. 183-184).

Pembentukan koalisi adalah sebagai upaya untuk mengumpulkan kekuatan untuk melawan *negara powerful* atau *rising power*. Pendapat Hurrel (2000) bahwa negara menengah berusaha menggunakan institusi internasional untuk mempertahankan diri terhadap norma atau aturan yang mempengaruhi kepentingan mereka atau jika memungkinkan dapat mengubah norma internasional yang dominan sesuai dengan keinginan mereka (Hurrel, 2000, p. 4). Contoh yang sesuai adalah Pembentukan IBSA *Dialogue Forum* yang digagas oleh India, Brazil dan Afrika Selatan sebagai wadah

untuk menentang legitimasi order internasional karena organisasi ekonomi internasional saat ini belum melayani kepentingan negara miskin (Flames, 2007, p. 17).

Ada perbedaan mengenai definisi *soft balancing*. Pertama, *soft balancing* hadir untuk melawan kekuasaan AS (Pape, 2005, p. 8; Paul T. , 2005, p. 58). Kedua adalah tidak ada perilaku *balance* baik itu *hard* dan *soft balancing* secara umum dan juga perilaku demikian tidak dipengaruhi oleh unilateralisme AS (Art, Brooks, Wohlfort, Lieber, & Alexander, 2006, pp. 183-184). Dari kedua pendapat tersebut, *soft balancing* tidak hanya fokus melawan AS, tetapi intinya *soft balancing* harus didorong oleh kombinasi kepentingan ekonomi, isu keamanan dan kepentingan domestik dalam mengimbangi negara yang rival atau berpotensi menjadi musuh (Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 2006, p. 147).

Untuk memahami lebih lanjut mengenai *soft balancing*, He dan Feng (2008) menjelaskan perbedaan antara *hard* dan *soft balancing*. Contoh *hard balancing* adalah perlombaan senjata, mobilisasi militer, aliansi militer formal, transfer teknologi ke negara aliansi atau bantuan ekonomi kepada negara aliansi. *Soft balancing* adalah mengurangi kapabilitas kekuasaan negara musuh untuk memperoleh keamanan. Contohnya adalah menjual senjata ke negara rival musuh, negosiasi *arms control*, pemberian sanksi ekonomi, embargo dan *strategic non cooperation* (He & Feng, 2008, p. 373).

He dan Feng (2008) juga menuliskan bahwa *soft balancing* adalah sikap mengimbangi negara musuh atau negara yang berpotensi mengancam dengan cara kerjasama bilateral dan multilateral (He & Feng, 2008, p. 363). Pendapat yang sama

juga dituliskan oleh Robert A Pape akan tetap dengan istilah yang berbeda yakni *entangling diplomacy* dan *economic strengthening* (Pape, 2005, p. 37). Argumen yang sama dijelaskan oleh penulis lain bahwa *soft balancing* sebagai upaya untuk melakukan kolaborasi diplomatis dengan negara lain dalam rangka mengimbangi aktor rival, musuh atau negara *rising power* (McDougall, 2014, pp. 330-331; Paul T. , 2005, p. 58).

*Soft balancing* dengan melakukan kerjasama diplomatik telah dilakukan oleh Tiongkok. Di dalam tulisan Marc Lanteigne (2012), ia menjabarkan tentang *soft balancing* Tiongkok di Kawasan Pasifik. Alasan Tiongkok melakukan *soft balancing* adalah adanya pengaruh AS, Australia dan Selandia Baru yang kuat di wilayah tersebut. Dengan demikian, pada tahun 2006, Tiongkok turut aktif melakukan kerjasama multilateral melalui konferensi tingkat tinggi PIF bahkan dalam kesempatan tersebut, Tiongkok mengumumkan akan memberikan bantuan pinjaman kepada negara anggota PIF sebesar US\$375 juta (Lanteigne, 2012, p. 35).

Contoh lain *soft balancing* adalah kasus Australia melakukan *soft balancing* terhadap Pengaruh Tiongkok. Bentuk *soft balancing* dalam hal menanggapi Pengaruh Tiongkok adalah masih berkaitan dengan bagaimana kondisi hubungan antara AS ke Tiongkok, maka Australia melakukan perimbangan dengan tetap menekankan hubungan dengan AS, dan pengembangan dengan kekuatan regional lainnya, seperti Jepang, Indonesia, dan India. Selain itu, Australia bergerak untuk menyeimbangkan Tiongkok dengan turut serta dalam bentuk kerjasama ekonomi regional baik itu APEC, ASEAN dan KTT Asia Timur (McDougall, 2011, p. 15).

*Soft balancing* juga dapat dilakukan dengan cara melibatkan diplomasi melalui perundingan multilateral dengan tujuan untuk menghalangi, menunda dan membatalkan suatu kebijakan negara yang agresif atau disebut *entangling diplomacy* (Pape, 2005, p. 36). Contohnya adalah Perancis dan Swedia menggunakan peraturan institusional dan prosedur PBB untuk menunda atau menghadang pelaksanaan kebijakan AS yang ingin melakukan perang dengan Irak. Umumnya, AS telah mendapatkan legitimasi kebijakan luar negeri dan militernya melalui persetujuan Dewan Keamanan PBB. Namun pada bulan September 2002, Perancis menolak resolusi AS yang ingin melakukan perang melawan Irak. Atas dasar keputusan Dewan Keamanan PBB, resolusi oleh AS tersebut ditunda. Resolusi tersebut terjadi jika Pertama, AS harus bersungguh sungguh menyelesaikan masalah dengan Irak dengan inspeksi senjata bersama. Kedua, perlu menunggu otorisasi resolusi perang sampai inspeksi selesai dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Perancis berhasil menunda AS untuk melakukan perang melawan Irak setidaknya selama satu tahun ketika perang AS dengan Irak terjadi pada tahun 2003 (Pape, 2005, p. 39).

Selain melibatkan diplomasi, Pape (2005) juga menjelaskan upaya *soft balancing* adalah penolakan akses teritorial atau *territorial denial* (Pape, 2005, p. 36). Studi kasus *territorial denial* adalah Turki menolak upaya AS menggunakan wilayah teritorial Turki sebagai tempat pementasan angkatan darat. AS meminta kepada Turki untuk mengizinkan penempatan 60.000-90.000 pasukan angkatan darat AS melalui Turki untuk menginvasi Irak. Turki menjawab pemerintah telah mengindikasikan

kesiapannya untuk memenuhi permintaan AS di semua area, kecuali penempatan pasukan angkatan darat AS di Turki (Gordon, 2003).

Selain peristiwa dalam rangka *soft balancing* terhadap AS, Tiongkok menjadi *rising power* yang mengancam negara lain khususnya isu Laut Tiongkok Selatan. Pada bulan Januari 2013, Filipina melakukan tuntutan kepada Tiongkok melalui pengadilan hukum laut di Denhag. Berdasarkan pasal XV UNCLOS, klaim Laut Tiongkok Selatan oleh Tiongkok termasuk klaim Kepulauan Sparty and Paracel telah melanggar Hak Filipina. Pada tahun 2016, pengadilan setuju atas klaim Filipina dan menolak klaim Tiongkok dimana klaim sejarah Tiongkok tidak didukung oleh bukti (Paul T. V., 2018).

Dari sekian pendapat beberapa penulis diatas, ada beberapa indikator mengenai *soft balancing*. Pertama, *soft balancing* adalah upaya untuk menentang negara yang lebih besar untuk memperoleh keamanan (Paul, Wirtz, & Fortman, 2004, p. 3). Kedua adalah *soft balancing* terjadi jika adanya pertimbangan mengenai kepentingan ekonomi, keamanan dan politik domestik suatu negara (Brooks & Wohlforth, 2005, p. 74; Oswald, 2006, p. 147). Ketiga adalah mekanisme *soft balancing* yakni mengurangi kapabilitas kekuasaan negara musuh untuk memperoleh keamanan. Contohnya adalah menjual senjata ke negara rival musuh, negosiasi *arms control*, pemberian sanksi ekonomi dan embargo dan *strategic non cooperation* (He & Feng, 2008, p. 373).

Keempat adalah selain mengurangi kapabilitas negara untuk memperoleh keamanan seperti gambaran He dan Feng (2008), *soft balancing* menawarkan *entangling diplomacy* dan *economic strengthening* (Pape, 2005, p. 36) dan membentuk

koalisi untuk memperoleh aset yang lebih besar (Art, Brooks, Wohlfort, Lieber, & Alexander, 2006, pp. 183-184; Oswald, 2006, p. 147).

Namun, konsep *soft balancing* perlu untuk dikritisi lebih lanjut. Berdasarkan dinamika negara dalam menggunakan kebijakan *balancing*, ternyata tidak selamanya pelaku adalah negara yang lebih lemah dari negara musuh. Contohnya adalah citra *super power* AS melakukan upaya *rebalance* di kawasan Asia-Pasifik yang disebabkan oleh Pengaruh Tiongkok (Berteau, Green, & Cooper, 2014, p. 19). Salah satu upaya *rebalance* AS di Asia Pasifik adalah menguatkan hubungan dengan aliansi terkuat nya Australia, Jepang, Filipina dan Korea Selatan (Berteau, Green, & Cooper, 2014, p. 19).

## 1.7 Landasan Konsep

### ***Soft Balancing***

Menurut Pape (2005), setidaknya ada empat strategi sebuah negara dalam melakukan *soft balancing* yaitu (i) *territorial denial*, (ii) *entangling diplomacy*, (iii) *economic strengthening*, (iv) *signals of resolve to balance*. ***Territorial denial*** adalah upaya suatu negara untuk tidak memberikan akses teritorial kepada negara lain. Hal ini untuk mengurangi aktivitas/pengaruh suatu negara terhadap negara lain. Indikator ini dilakukan ketika negara superior mendapatkan keuntungan akses teritorial dari pihak ketiga sebagai area pementasan angkatan udara dan transit angkatan laut dan udara. Melawan agar membatasi akses teritorial dapat mengurangi kemenangan negara superior dengan cara meningkatkan masalah logistik atau memaksanya untuk melawan

hanya dengan kekuatan angkatan laut atau udara saja demi mengurangi perlawanan dengan kekuatan yang lengkap dari negara superior ke negara yang lemah.

***Entangling diplomacy*** adalah melibatkan diplomasi dimana suatu negara menyeimbangkan negara lain dengan cara diplomasi melalui perundingan multilateral. Bahkan negara superior tidak mampu untuk menyangkal peraturan organisasi internasional untuk memenangkan proses diplomasi tanpa dukungan dari negara anggota yang penting. Dengan demikian, negara dapat menggunakan atau memanfaatkan peraturan dan prosedural organisasi internasional untuk menunda rencana perang negara superior atau mengurangi dampak tidak terduga dikemudian hari. Setidaknya proses ini digunakan untuk mengulur waktu agar negara dapat menyiapkan diri melawan negara superior bahkan proses menunda tersebut membuat isunya tidak relevan lagi. Singkatnya, kapabilitas seorang aktor melakukan diplomasi dapat menghambat atau mencegah negara lain melakukan tindakan sewenang wenang atau dapat mengurangi kerugian perang.

***Economic strengthening*** adalah membangun suatu blok perdagangan dalam upaya mengimbangi kekuatan negara superior. Kekuatan militer yang kuat didukung oleh ekonomi yang kuat. Negara superior tentunya memiliki kekuasaan besar baik dalam militer dan ekonomi. Untuk mengimbangnya, setidaknya untuk jangka panjang adalah meningkatkan ekonomi masing-masing. Caranya adalah dengan membangun sebuah blok perdagangan regional yang dapat meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi untuk para anggota blok tetapi dengan tidak menyertakan



negara superior tersebut. Jika berhasil, maka secara keseluruhan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi negara superior.

*Signals of resolve to balance* adalah tekad yang kuat dengan melakukan tindakan kolektif bersama negara *second-ranked powers* untuk menjaga komitmen dalam rangka perimbangan negara superior. Jika negara berulang kali melakukan kerjasama, maka secara bertahap akan meningkatkan kepercayaan untuk mengimbangi negara superior terutama rencana ambisius negara superior. Hal ini dilakukan karena kapabilitas negara *second-ranked powers* lebih kecil dari pada negara superior, sehingga akan lebih baik negara *second-ranked powers* tidak sendirian mengimbangi negara superior (Pape, 2005, pp. 36-37).

Untuk indikator pertama yakni *territorial denial*, Australia perlu mengaplikasikan upaya penolakan akses teritorial Papua Nugini kepada Tiongkok. Namun sejauh ini belum ada upaya dalam meningkatkan masalah logistik atau melawan Tiongkok dengan menggunakan kekuatan angkatan laut atau darat yang ditujukan untuk melawan Tiongkok.

Lain halnya dengan indikator kedua, Australia bersama dengan AS dan Jepang mengaplikasikan *entangling diplomacy* yakni memanfaatkan 50<sup>th</sup> ASEAN *Ministrial Meeting* untuk mendorong agar Tiongkok dan ASEAN menyelesaikan pembuatan *Code of Conduct for the South China Sea* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang mengikat secara hukum, efektif dan bersesuaian dengan hukum internasional (Gao, 2017). Upaya ini dilakukan karena Tiongkok melakukan tekanan publik kepada Papua Nugini mendukung posisi Tiongkok dalam Laut Tiongkok Selatan (Jones,

2017). Hasilnya adalah Papua Nugini kini mendukung posisi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). Kondisi ini menghasilkan kondisi yang tidak bersesuaian dengan kepentingan Australia yakni kawasan Indo -Pasifik yang stabil termasuk kawasan Asia Utara, Laut Tiongkok Selatan dan Jalur komunikasi Laut di Samudera India dan Pasifik (Australian Government: Defence White Paper, 2016, pp. 17-18).

Australia juga mengaplikasikan indikator ketiga yakni *economic strengthening* dengan membuat sebuah program khusus dengan tidak mengikutsertakan Tiongkok di dalamnya yaitu *Seasonal Workers Program*. *Seasonal Workers Program* sebuah program bagi pengusaha dapat merekrut petani agrikultur yang berasal dari negara-negara Pasifik untuk bekerja di Australia (Australian Government: Department of Employment, Skills, Small and Family Business, 2019). Meskipun *Seasonal Workers Program* dibentuk pada tahun 2012, namun pada tahun 2015 hingga 2016 terlihat adanya peningkatan akan partisipasi Papua Nugini dalam *Seasonal Workers Program*. Partisipasi mulai dari 26 orang pada tahun 2012-2014 kemudian meningkat dengan total 35 orang pada tahun 2014-2015 dan 42 orang pada tahun 2015-2016 (Zhao, Binks, Kruger, Xia, & Stenekes, 2018).

Menurut Hegarty (2015) Program ini muncul bukan dijadikan sebagai mengimbangi langsung atas Pengaruh Tiongkok. Namun dapat dijadikan sebagai upaya Australia mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik, meningkatkan keamanan regional dan pengaruh di Pasifik (Hegarty, 2015, p. 9).

Australia juga mengaplikasikan indikator keempat yakni *signals of resolve to balance*. Berdasarkan definisi *signals of resolve to balance* yang artinya adalah permainan koordinasi secara timbal balik bersama dengan negara lain maka aplikasinya adalah Australia adalah bekerjasama dengan AS dan Jepang dengan membentuk Kerjasama Trilateral Untuk Investasi Infrastruktur Di Indo-Pasifik termasuk Papua Nugini (Export Finance Australia, 2019). Hal ini dilatarbelakangi oleh pengaruh Tiongkok yang ada pada segi Bantuan Luar Negeri Tiongkok. Bantuan untuk Papua Nugini berada pada sektor transportasi 28%, pendidikan 18% dan industri, pertambangan dan konstruksi 16% (Brant, 2015).

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Menurut Bromley (1986), ada sepuluh langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan penelitian kualitatif. Langkah tersebut adalah (Bromley, 1986, p. 26)

- i. Menentukan rumusan masalah
- ii. Mengumpulkan informasi untuk memahami masalah penelitian, konsep dan teori
- iii. Menyarankan beberapa interpretasi atau jawaban penelitian atau pertanyaan sesuai dengan informasi awal yang telah ditemukan
- iv. Menggunakan interpretasi tersebut sebagai bukti yang akan mendukung atau kontradiksi dengan penelitian, ganti interpretasi atau jawaban jika perlu

- v. Melanjutkan untuk mencari bukti bukti lain. Menghilangkan interpretasi atau jawaban yang berlawanan dengan bukti yang telah ditemukan
- vi. Mengecek kembali kualitas dan sumber bukti untuk memastikan akurasi dan konsistensi
- vii. Berhati hati memeriksa logika dan validitas argumen yang mengarah ke kesimpulan
- viii. Memilih studi kasus terkuat untuk jika memiliki lebih dari satu kesimpulan
- ix. Jika memungkinkan, membuat rencana aksi penelitian
- x. Menyiapkan laporan penelitian.

Melakukan penelitian kualitatif membutuhkan data, konsep dan teori. Teori dapat di kembangkan ketika memiliki data yang cukup dan akurat yang diperoleh dari penelitian lapangan (Walliman, 2011, p. 131). Pada penelitian kali ini, penulis melakukan pemahaman dan pendeskripsian konsep *soft balancing* kemudian mengembangkan konsep tersebut melalui studi kasus.

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan sumber yang berasal dari data sekunder. Tipe data sekunder berbentuk turtulis, non tertulis dan data survei yang berasal dari informasi statistik. Data tertulis dapat berbentuk catatan suatu organisasi atau instansi seperti laporan internal, laporan tahunan, catatan produksi, data personal, laporan devisi dan hasil pertemuannya termasuk komunikasi baik berupa email, surat, catatan kecil. Publikasi seperti buku, jurnal, surat kabar, salinan iklan dan publikasi pemerintah (Walliman, 2011, pp. 94-95).

Data non tertulis berupa program televisi, radio, rekamanan, video, film, *live report*, wawancara, hasil seni dan historik artefak. Data survei berupa sensus penduduk tentang populasi, data ekonomi, survei penjualan, ramalan ekonomi dan sikap karyawan. Data survei biasanya dilakukan sevara berkala dan terus menerus, sementara bahkan sekali saja yang terbatas pada sektor, waktu dan area (Walliman, 2011, p. 95).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari ketiga jenis tipe data sekunder tersebut. Contohnya adalah menggunakan fasilitas jurnal *Jstor* untuk mencari artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selain portal jurnal, penelitian kali ini juga menggunakan sumber dari situs web resmi pemerintah Australia seperti *Australia Foregin Policy White Paper*, atau berita dan majalah seperti *BBC*, *The Australian*, *The Diplomat* dan lain lain. Selain itu penulis juga mengambil data dari laporan seperti CSIS dan ASPI.

Data non tertulis adalah mengambil data yang bersumber dari hasil wawancara yang tercantum dari platform video *Youtube* dan sejenisnya. Kemudian untuk data survei, penelitian ini mengambil data survei yang dikeluarkan oleh *The Lowy Institute* dan *The Interpreter*.

Penulis menggunakan penelitian analisis retorik. Analisis retorik adalah analisis yang menggunakan bahasa dan pendapat untuk membujuk pendengar dan pembaca (Walliman, 2011, p. 141). Sehingga pada penelitian ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian untuk mempengaruhi bahwa Pengaruh Tingkok

merupakan musuh atau berpotensi menjadi musuh bagi Australia, setidaknya dalam jangka panjang. Penulis akan menuliskan argumen yang kemudian didukung oleh bukti-bukti yang bersumber dari data sekunder. Sebagaimana posisi Australia sebagai *hegemonic power* (McDoughall, 2007, p. 868), maka Australia perlu mempertahankan eksistensinya di Kepulauan Pasifik termasuk Papua Nugini. Maka penulis menggunakan penelitian analisis retorik dengan menggunakan konsep *soft balancing* yang terdiri dari strategi *territorial denial*, *entangling diplomacy*, *economic strengthening* dan *signals of resolve to balance* sebagai alat yang dapat menjelaskan rumusan masalah penelitian.

#### 1.8.2 Subyek Penelitian

Objek penelitian yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian kali ini adalah Pemerintah Australia pada periode PM Malcolm Turnbull (2015-2018) dan Perdana Menteri Scott Morrison (2018-2019). Penulis akan meneliti setiap kebijakan pemerintah Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.

#### 1.8.3 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Sumber bacaan berasal dari dua sumber yakni sumber bacaan utama dan sumber bacaan tambahan (Syamsyuddin & Damaianti, 2009, p. 61). Sumber bacaan yang berasal dari penulis asli atau peneliti. Sumber bacaan utama mengandung laporan atau teori yang ditulis secara teknis dan terperinci. Sumber bacaan tambahan adalah sebuah bacaan yang berasal dari penelitian sebelumnya

dan menggabungkan penelitian secara ilmiah. Sumber bacaan tambahan adalah dapat berupa monograf, artikel dan jurnal yang berisi tinjauan penelitian (Syamsyuddin & Damaianti, 2009, p. 61).

Sumber bacaan utama dalam penelitian ini adalah bahan bacaan yang membahas teori *soft balancing*, dokumen dan situs resmi dari pemerintah Australia seperti Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia (*Australia Foreign Policy White Paper*) Buku Putih Pertahanan Australia (*Defence White Paper*) dan pernyataan pemerintah melalui situs web resmi Australia. Sumber bacaan tambahan adalah berasal dari berita dan article yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk gambar, kata-kata dan bukan dalam bentuk angka (Yusuf, 2014, p. 333).

Dari alat pengumpulan data yang telah disebutkan, penulis akan mendapatkan data terkait dinamika kebijakan Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini.

#### 1.8.4 Tahap tahap Proses Penelitian

Penelitian ini telah merumuskan masalah yakni bagaimana aplikasi *soft balancing* Australia sebagai upaya mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini tahun 2015-2019

Tahapan selanjutnya adalah studi literatur. Fungsi dari studi literatur adalah untuk mengidentifikasi Australia yang mengeluarkan kebijakan untuk

mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019 sesuai dengan konsep *soft balancing*. Setelah melakukan studi literatur, maka penulis akan memahami gagasan literatur tersebut kemudian mengaplikasikannya setiap kebijakan Australia dalam mengimbangi Pengaruh Tiongkok di Papua Nugini pada tahun 2015-2019 sesuai dengan konsep *soft balancing* dalam bentuk analisis retorik sehingga penelitian dapat menjawab rumusan masalah.